



Judul : Cegah Serangan Siber, Anggaran BSSN Minim
Tanggal : Sabtu, 10 Juni 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Masih Kekurangan Anggaran Rp 11,4 Triliun **Kejaksaan Diingatkan Terkait Temuan BPK**

Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan merespons permintaan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk meminta dukungan penambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp 11,4 triliun. Permintaan ini lebih besar daripada pagu indikatif Kejaksaan sebesar Rp 10 triliun lebih.

MESKI angka yang diminta cukup tinggi, namun dinilai masih relevan.

"Karena banyaknya infrastruktur kejaksaan yang perlu dibenahi," kata politisi Partai Demokrat itu dalam rapat kerja bersama Wakil Jaksa Agung Sunarta di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6).

Hinca menegaskan, Fraksi Demokrat menempatkan pelayanan hukum dan pelayanan rasa keadilan kepada masyarakat sebagai sesuatu hal yang tidak bisa ditawar.

Untuk itu, sangat penting menempatkan keadilan bagi masyarakat sebagai prioritas utama dalam rangka memenuhi tugas negara kepada warga negara.

Namun, Hinca menggarisbawahi sejumlah isu kebutuhan

anggaran Kejaksaan Agung. Terutama dua poin dari tujuh rencana strategis Kejaksaan. Yakni, di poin enam tentang kajian dan langkah-langkah strategis Kejaksaan pasca perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Kejaksaan Agung, dan sejumlah aturan lainnya yang berdampak pada Korps Adhyaksa.

"Jika KUHP lama kita gunakan pendekatan Belanda sebagai penjajah, rakyat yang dijajah, kalau melawan langsung masuk penjara. Sedangkan KUHP merah putih tidak. Pendekatannya adalah musyawarah yang sering kita gaungkan dengan *restorative justice*," ujarnya.

Berikutnya di poin tujuh, jelas Hinca, terkait upaya Kejaksaan memperkuat pengelolaan

aset hasil tindak pidana guna mengoptimalkan peningkatan keuangan negara.

Masalah ini mesti menjadi perhatian serius karena anggaran yang digelontorkan kejaksaan untuk pemeliharaan barang bukti ini sebesar Rp 52,5 miliar. Apalagi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan catatan kepada Kejaksaan.

Dalam catatannya, BPK menyebut adanya kelebihan bayar pekerjaan atas realisasi belanja modal pada tujuh satuan kerja yang tidak sesuai dengan dokumen perjanjian. Selain itu, BPK juga menemukan bahwa pengelolaan barang rampasan ini belum memadai.

"Oleh BPK ditemukan 9 masalah. Mulai dari terdapatnya barang rampasan yang tidak memiliki nilai atau harga tafsiran sampai belum dilakukan lelang dan seterusnya. Yang penting, nomor 6 terdapat barang bukti yang telah inkrah tetapi belum dilakukan eksekusi. Artinya keadilan tidak menyentuh garis finish," ujarnya.

Hinca menyebutkan, upaya penyelesaian barang bukti berstatus inkrah melalui pengadilan kepada yang berhak belum dilaksanakan secara memadai. Sebab, masih banyak masyarakat yang mengadu bahwa sudah dinyatakan menang di pengadilan sampai putusannya inkrah, tetapi barang bukti yang disita tidak dikembalikan.

Dia lalu mengungkapkan kasus terpidana di Kejaksaan Negeri Medan yang oleh Mahkamah Agung pada tahun 2021 dalam putusannya memerintahkan agar seluruh barang yang disita dikembalikan. "Ada 5 butir, tetapi tidak dikembalikan atau masih ditahan," katanya.

Makanya BPK merekomendasikan untuk sita barang bukti ini perlu koordinasi dengan Jaksa Bidang Pengawasan (Jamwas) untuk menelusuri benda sitaan atau yang belum diserahkan.

"Misal soal saham, tanah, itu banyak sekali. Dengan anggaran Rp 52 miliar itu bisa dituntaskan. Kalau milik negara, langsung eksekusi serahkan ke negara.

Kalau milik terpidana yang sudah inkrah, langsung diserahkan," harapnya.

Sementara, Wakil Jaksa Agung Sunarta menyatakan, pihaknya telah mengirimkan kebutuhan riil Kejaksaan Agung untuk tahun anggaran 2024 kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebesar Rp 43,57 triliun.

Namun, berdasarkan surat bersama Kemenkeu dan Bappenas, pagu indikatif Kejaksaan untuk tahun 2024 sebesar Rp 10 triliun lebih.

Postur anggaran pagu indikatif tahun 2024 dirasa masih belum cukup untuk memenuhi sebagian kebutuhan rencana belanja prioritas Kejaksaan.

"Kejaksaan masih terdapat kekurangan sebesar Rp 11,43 triliun. Besar harapan kami permintaan tersebut dipenuhi dan mendapat dukungan teman-teman Komisi III dalam pelaksanaan fungsi dan anggaran," jelas Sunarta. ■ KAL